



Semua Pihak Wajib

Wujudkan Sekolah Ramah Anak

UMBULHARJO -- Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) kepada Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Yogyakarta di Ruang Bima Komplek Balikota Yogyakarta, Selasa (3/11). Sosialisasi ini digelar sebagai upaya menekan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap anak yang masih terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Walikota Yogyakarta, H Haryadi Suyuti dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, perwujudan sekolah ramah anak menjadi kewajiban semua pihak di lingkungan sekolah. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai apa, mengapa, bagaimana dan siapa yang terlibat dalam penciptaan sekolah ramah anak bagi semua pihak di bidang pendidikan.

"Melalui forum ini saya yakin dan optimis bahwa keberhasilan Kebijakan Sekolah Ramah Anak ini akan sungguh bermanfaat dalam memberikan jaminan keamanan, jaminan perlindungan dari kekerasan serta rasa nyaman bagi siswa didik dalam menuntut ilmu selama berada di lingkungan sekolah. Sehingga suasana sekolah yang nyaman, akan menjadikan institusi sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi para peserta didik," tuturnya.

Menurutnya, anak merupakan tumpuan harapan yang menentukan nasib bangsa di masa depan. Karenanya, mereka harus dijaga dari berbagai macam kekerasan, intimidasi dan diskriminasi agar memperoleh rasa aman dan nyaman di mana pun berada. Salah satunya di sekolah yang berusaha diwujudkan dengan program SRA.

Ketua Jejaring Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Trafficking Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslimadaton mengatakan, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta masih sangat memprihatinkan. Pelakunya tidak hanya orang dewasa, namun sudah merambah ke anak usia dini.

"Fenomena yang sangat mengengangkan adalah kasus kehamilan anak usia dini (12-17 tahun) di tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 90 kasus. Yang membuat prihatin, ada sebagian dari anak-anak tersebut tidak tahu kalau hamil," ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab tingginya penyimpangan seks oleh anak karena mudahnya mengakses situs porno di internet. Untuk mencegahnya, pemerintah perlu memiliki center bank data situs yang akan memfilter situs-situs yang mengandung konten pornografi. Tak kalah penting untuk terus digalakkan upaya memperkokoh ketahanan keluarga.

Sementara itu, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Kota Jogja Iffa Aryani memaparkan, ada beberapa indikator untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Melalui kebijakan perlindungan anak dengan adanya program usaha kesehatan sekolah, pelibatan siswa dalam membuat kebijakan sekolah, pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah, penyelenggara dan pengelola sekolah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), hingga pembelajaran dengan metode Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).

"Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak," jelasnya. (qin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. KPMP	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Sege
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Yog
Tid

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005